



GAPKI

NEWS



GAPKI DUKUNG PENUH
PROGRAM KETAHANAN
PANGAN DAN ENERGI

Peran GAPKI Dalam Ketahanan Pangan dan Energi

Pembaca yang budiman,

Mengawali penerbitan buletin *GAPKI News* tahun 2025 pada bulan Februari 2025 ini, tidak ada kata yang patut kita ungkapkan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenan-Nya kita semua dalam kondisi sehat dan *GAPKI News* hadir untuk menyapa dan menyampaikan informasi terkini dan aktivitas GAPKI.

Buletin *GAPKI News* edisi Februari 2025 ini menyajikan topik penting tentang partisipasi dan dukungan aktif GAPKI kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Program yang berkaitan dengan pangan merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dikemas dalam beberapa bentuk program.

Untuk mencapai swasembada pangan, setiap potensi lahan dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Melalui program tumpang sari atau *intercropping*, GAPKI telah menjalankan program ini sejak tahun lalu. Bahkan, tidak sedikit anggota GAPKI yang telah menjalankan tumpang sari sejak beberapa tahun lalu.

Bagi GAPKI, keterlibatan dalam program ketahanan pangan dan energi adalah keniscayaan karena komoditas sawit yang paling memungkinkan untuk mewujudkan program Presiden Prabowo ini. Kelapa sawit mampu menjawab dua kebutuhan, yakni pangan dan energi di mana ketahanan energi diwujudkan melalui program *mandatory* biodiesel.

Selain partisipasi GAPKI dalam program ketahanan pangan dan energi, beberapa tema menarik seperti pentingnya badan sawit menjadi kajian dalam edisi ini. Semoga penerbitan awal tahun 2025 ini menjadi energi memperjuangkan kemajuan industri sawit nasional. Selamat membaca. ■

Salam,
Redaksi GAPKINews

GAPKINews

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT

GAPKI Pusat

PEMBINA

Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH

Mukti Sardjono

TIM AHLI

Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB

Fenny Sofyan

Dewan Redaksi

Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Ratri Melanda Maharani
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT

Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Tanam Perdana Padi Gogo di Lahan PSR Sumatera Selatan.....12

Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Memotret Tantangan dan Peluang Industri Sawit.....	4
Produksi dan Ekspor Naik, Persediaan Menurun.....	5
GAPKI Dukung Penuh Ketahanan Pangan dan Energi.....	6,7
Potensi Pangan dari Lahan Tumpang Sari.....	8
Menjaga Keseimbangan Supply and Demand Minyak Sawit.....	9
GAPKI Terima Apresiasi Outstanding Conserving Sustainable Nature.....	10
Nilai Strategis PSR dalam Ketahanan Pangan dan Energi.....	11
China Semakin Concern dengan Sawit Berkelanjutan.....	13
Badan Sawit Solusi Tata Kelola Industri Sawit.....	14,15
Suara Harapan dari Dunia Usaha.....	16



Pakistan, Pasar Potensial yang Harus Dirawat.....17



GAPKI Bangun Dialog Ketenagakerjaan dengan Eropa18,19

Komitmen GAPKI Stabilkan Rantai Pasok CPO untuk Pakistan.....	20
Meningkatkan Nilai Tambah dengan Diversifikasi Produk.....	21
GAPKI Sumut Bahas Isu Terkini Bersama Pj Gubernur Sumut.....	22
Ryan Hari Suprianto, Nakhoda Baru GAPKI Cabang Jambi.....	23
GAPKI dan LPPNU Matangkan Sawit Goes to Pesantren.....	24

MEMOTRET TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI SAWIT

Potensi industri ini untuk tumbuh dan semakin signifikan terbuka lebar.

Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia semakin besar pada 2025. Penurunan produksi yang terjadi sepanjang 2024 diprediksi masih berlangsung akibat belum optimalnya realisasi peremajaan sawit rakyat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam seminar *Outlook Industri Sawit Indonesia: Mengupas Perspektif Pengusaha, Industri, dan Petani Sawit di Jakarta* pada 21 November 2024.

Seminar yang diadakan *Warta Ekonomi dan Industry.co.id* juga menghadirkan pembicara seperti Sekjen Apkasindo Rino Afrino, Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi, peneliti LPEM UI Dr. Eugenia Mardanugraha, dan Kepala Pusat Studi Sawit IPB Prof. Budi Mulyanto. Selain aspek bisnis industri

sawit ke depan, seminar ini juga membahas geopolitik yang sangat berpengaruh pada komoditas sawit di pasar internasional.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan produksi CPO pada September 2024 sebesar 4.021 ribu ton. Sedangkan produksi PKO sebanyak 394 ribu ton atau naik dibanding Agustus 2024 sebesar 391 ribu ton. Namun, secara year on year sampai Saptember 2024, produksi CPO dan PKO tahun 2024 turun 4,62% dibandingkan periode yang sama 2023 yakni 40.823 ribu ton. Penurunan produksi disebabkan oleh berbagai faktor.

Kecenderungan penurunan produksi menjadi tantangan tersendiri bagi industri sawit karena perubahan geopolitik yang akan terjadi pada 2025. Tapi, melihat daya tahan industri sawit selama ini dari berbagai

tantangan, peluang industri sawit untuk berkembang masih tetap besar. Menurut Ketua Yayasan President University, Budi Susilo Soepanji, potensi industri ini untuk tumbuh dan semakin signifikan terbuka lebar.

Dalam pandangan Budi Susilo, industri sawit yang sudah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia harus dipertahankan dalam kondisi apapun. Pengembangan industri sawit harus dilakukan sejalan dengan dinamika global. Termasuk menyesuaikan diri dengan tuntutan *standard* keberlanjutan. Dia yakin dengan kekuatan dan potensi kelapa sawit sebagai komoditas yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan komoditas lainnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan diperlukan pembedaan isu secara multi perspektif dan multidimensional dari sektor kelapa sawit. Hal ini penting untuk arus utama kepentingan perekonomian nasional. Sebab, potensi industri sawit masih terbuka lebar. Hal ini terlihat dari hilirisasi yang bertumpu pada produk sawit sehingga bergantung dengan pasokan minyak sawit mentah.

Dia mengatakan pemerintah memberikan dukungan penuh sawit berkelanjutan untuk pertumbuhan energi, ketahanan pangan, dan ekspor. Program PSR adalah salah satu bentuk dukungan konkret untuk meningkatkan produksi sawit di masa depan. Selain itu, aspek SDM juga perlu pembenahan untuk meningkatkan kemampuan bertani dan berproduksi. ■



PRODUKSI DAN EKSPOR NAIK, PERSEDIAAN MENURUN

Ekspor tahun 2024 lebih rendah 10,0% dibandingkan ekspor 2023 untuk periode Januari-Oktober 2024.

Produksi CPO dan PKO di Oktober 2024 mencapai 4.843 ribu ton atau naik 9,69% dibanding produksi September 2024 sebesar 4.415 ribu ton. Produksi CPO dan PKO pada Oktober 2024 sebanyak 43.780 ribu ton ini lebih rendah 4,56% dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar 45.776 ribu ton.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono mengatakan total konsumsi dalam negeri naik menjadi 2.083 ribu ton dari 1.989 ribu ton pada September 2024.

Konsumsi untuk biodiesel naik 12,07% menjadi 1.052 ribu ton pada Oktober dibandingkan 934 ribu ton pada bulan sebelumnya. Adapun konsumsi untuk pangan turun 2,31% dari 865 ribu ton di September 2024 menjadi 845 ribu ton pada Oktober 2024.

Dalam pernyataan resmi GAPKI pada 29 Desember 2024 tercatat konsumsi untuk oleokimia turun 2,11% menjadi 186 ribu

ton pada Oktober 2024 dari 190 ribu ton pada September 2024. "Secara tahunan sampai Oktober 2024, total konsumsi dalam negeri pada tahun 2024 mencapai 19.642 ribu ton lebih tinggi 1,90% dari tahun 2023," kata Mukti Sardjono.

Konsumsi untuk pangan mencapai 8.375 ribu ton, turun 3,64% dari tahun 2023 yakni 8.680 ribu ton. Untuk oleokimia sebesar 1.860 atau turun 1,48% dibandingkan tahun sebelumnya 1.888 ribu ton. Sedangkan biodiesel 9.407 ribu ton atau naik 8.01% dari tahun sebelumnya yakni 8.709 ribu ton. Total ekspor naik 27,79% dari 2.260 ribu ton pada September 2024 2.888 ribu ton pada Oktober 2024.

Kenaikan 31,66% terjadi pada produk olahan CPO dari 1.573 ribu ton pada September 2024 menjadi 2.071 ribu ton pada Oktober 2024. Kenaikan juga diikuti CPO dari 128 ribu ton pada September 2024 menjadi 345 ribu ton pada Oktober 2024.

Ekspor oleokimia turun 13,23% dari 408 ribu ton pada September 2024 menjadi 354 ribu ton pada Oktober 2024.

Untuk negara tujuan ekspor pada Oktober 2024, terjadi kenaikan untuk tujuan India, Uni Eropa, Afrika, Pakistan, Timur Tengah, Bangladesh dan Malaysia. Sedangkan ekspor tujuan China dan Amerika Serikat mengalami penurunan. Ekspor ke India naik dari 242 ribu ton pada September 2024 menjadi 719 ribu ton pada Oktober 2024. Sedangkan ekspor tujuan China turun dari 487 ribu ton pada September 2024 menjadi 437 ribu ton pada Oktober.

Mukti Sardjono mengatakan ekspor tahun 2024 lebih rendah 10,0% dibandingkan ekspor 2023 untuk periode Januari-Oktober 2024. Nilai ekspor Oktober mencapai US\$2,943 juta atau naik 34,82% dibandingkan September 2024 sebesar US\$ 2.18 juta. Secara tahunan sampai September 2024 nilai ekspor tahun 2024 mencapai US\$22,47 juta atau 12,2% lebih rendah dari nilai ekspor 2023 sebesar US\$25,58 juta. ■



GAPKI DUKUNG PENUH KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Sebanyak 301 ribu hektar lahan dari 509 anggota GAPKI potensial ditanami jagung.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tampak optimistis target swasembada pangan terwujud tahun ini. Keyakinan itu disampaikan dalam peresmian program *Tanam Jagung Serentak 1 Juta Hektar di 19 Provinsi* yang dipusatkan di Desa Karang Mukti, Kabupaten Subang pada 21 Januari 2025. Kerjasama Kementan dan Polri ini didukung penuh oleh GAPKI, Perhutani, Inhutani, Swadaya Tani, dan lain-lainnya.

Peresmian program ini ditandai dengan penanaman jagung di lahan seluas 13 hektar. GAPKI diwakili oleh Kabid Perkebunan R. Aziz Hidayat yang hadir di lokasi percontohan di Subang. Tanam jagung ini juga dilakukan di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau,

Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan Barat.

Mentan Amran Sulaiman mengapresiasi dukungan semua pihak pada program swasembada pangan, khususnya jagung. Ia optimis kolaborasi besar ini dapat mempercepat pencapaian swasembada jagung sesuai arahan Presiden. Mentan Amran menegaskan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian seperti jagung, pangan bergizi, biofuel, dan hilirisasi. Ketiga program strategis ini berakar di pertanian.

Optimisme swasembada pangan tahun ini tercapai tidak lepas dari potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman padi dan jagung. Satu juta hektar lahan jagung ini diharapkan menghasilkan

5-7 juta ton jagung sampai akhir 2025. Karena itu, pemanfaatan lahan kering, lahan kosong hingga tumpang sari dioptimalkan. Khusus untuk tumpang sari, GAPKI sudah mengawali sejak tahun lalu, bahkan beberapa tahun sebelumnya pada area terbatas.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan Polri diberi tugas untuk mendukung swasembada pangan melalui program tanam jagung. Kapolri cukup optimis target 1 juta hektar akan tercapai pada kuartal keempat tahun ini. Menurut Kapolri, memasuki kuartal pertama tahun ini, pihaknya telah menanam lebih dari 300 ribu hektar. Harapannya, hingga kuartal keempat, target satu juta hektar tercapai.

Selain itu, Kapolri juga menyoroti manfaat program ini yang tidak hanya untuk swasembada pangan tetapi juga mendukung program makan bergizi. Penanaman satu juta hektar lahan ini memiliki manfaat besar, termasuk mendukung ekosistem makan bergizi gratis. Jagung yang ditanam juga dapat





dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ayam, bebek, dan lainnya, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan lahan perusahaan sawit anggota GAPKI untuk tumpang sari tanaman pangan disampaikan oleh Mentan Amran Sulaiman dalam *Koordinasi Pengembangan, Mendukung Percepatan Swasembada Pangan* di Kantor Kementan pada 15 Desember 2024. Selain lahan perusahaan kelapa sawit anggota GAPKI, pemerintah juga memanfaatkan lahan Perhutani, Inhutani, dan PTPN Holding.

Tumpang sari tanaman pangan dilakukan di lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) kelapa sawit, kelapa, dan komoditas lainnya. Penanaman jagung dikerjasamakan dengan Polri. Sedangkan penanaman padi gogo dikerjasamakan dengan TNI. Pemanfaatan lahan anggota GAPKI, Perhutani, dan PTPN untuk jagung ini tidak mengganggu lahan tumpang sari untuk padi gogo.

Pemerintah menargetkan 500.000 hektar lahan di kebun sawit untuk

padi gogo pada 2025. Untuk jagung, penanaman sudah bisa dimulai pada semester pertama 2025 atau Januari 2025. Berdasarkan catatan Ditjenbun Kementerian Pertanian, ada potensi 30% lahan TBM di kebun sawit, kelapa, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk jagung.

Kementan menyatakan ada sekitar 1 juta hektar lahan yang berpotensi ditanami jagung dari lahan TBM sawit, kelapa, karet, dan hutan tanaman industri (HTI). Jika merujuk pada data SIPERIBUN, ada 520 ribu hektar lahan di area TBM. Sebanyak 301 ribu hektar lahan dari 509 anggota GAPKI potensial ditanami jagung. Namun, dari total luasan lahan ini, sebagian lahan sudah ada *cover crops* dan kanopi yang mulai menutupi lahan.

Terkait ketersediaan lahan, GAPKI menyampaikan bahwa area TBM mencakup TBM 1, TBM 2, dan TBM 3 yang umumnya sudah ada *cover crops* dan kanopi yang menutupi lahan. Karena itu, lahan sawit yang dapat dimanfaatkan untuk jagung adalah lahan yang sedang *replanting* dan

belum ada *cover crops*. Kesesuaian data luasan lahan ini akan diverifikasi untuk ditentukan total luasan lahan yang dapat digunakan untuk jagung.

Kementan menegaskan lahan untuk penanaman jagung bukan lahan existing, tetapi lahan baru atau yang belum pernah dilakukan penanaman jagung. Varietas jagung yang ditanam adalah jagung dengan kandungan pati yang tinggi untuk mendukung kebutuhan konsumsi makanan dan minuman serta pakan. Varietas jagung akan disiapkan oleh Ditjen Tanaman Pangan Kementan.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan komitmen GAPKI mendukung ketahanan pangan dan energi. Komitmen dukungan GAPKI dijalankan bersamaan dengan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui jalur kemitraan. Penerapan program terkait ketahanan pangan paling awal adalah *Tanam Perdana Program PSR Jalur Kemitraan Binaan GAPKI dan Tumpang Sari Padi Gogo* di Kabupaten Kotabaru pada Kalimantan Selatan, 25 Mei 2024.

Integrasi tanaman padi gogo di sela-sela tanaman sawit ini untuk menyediakan pangan bagi masyarakat di sekitar kebun sawit dan mendukung ketahanan pangan nasional. Integrasi tanaman pangan dan kelapa sawit ini dikenal dengan Program Kesatria atau tumpang sari tanaman pangan yang digagas kementan. ■



POTENSI PANGAN DARI LAHAN TUMPANG SARI SAWIT

Tumpang sari padi gogo di lahan PSR dapat menyumbang produksi beras lebih dari 1,8 juta ton/tahun.



Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian swasembada pangan, GAPKI terus mendukung program pemerintah. Salah satunya adalah tumpang sari padi gogo di lahan sawit petani dalam konsep kemitraan untuk percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tumpang sari padi gogo di lahan sawit diharapkan berdampak signifikan pada swasembada pangan. Apalagi IPB University menghasilkan benih unggul IPB 9 Garuda.

Kinerja benih padi gogo ini dipaparkan dalam seminar nasional *Potensi Intercropping Padi Gogo di Lahan PSR untuk Mendukung Swasembada Beras* yang diselenggarakan oleh IPB University di Bogor pada 19 November 2024. Dalam agenda ini, GAPKI diwakili oleh Direktur Eksekutif Mukti Sardjono. Seminar ini juga dihadiri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Rektor IP Arif Satria, Dirut Holding Perkebunan Nusantara M. Abdul Ghani, dan lain-lainnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sedang menghadapi tantangan besar di

sektor pertanian di tengah perubahan iklim, gejolak ekonomi global, peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan populasi. Untuk menjawab tantangan ini maka, *intercropping* padi gogo di lahan PSR menjadi salah satu solusi inovatif untuk mendukung swasembada beras.

Untuk mendukung produktivitas tumpang sari padi gogo di lahan PSR, IPB University telah mengenalkan inovasi baru IPB 9 Garuda. Varietas padi gogo ini memiliki produktivitas tinggi hingga 11,3 ton/hektar gabah kering panen (GKP). Keunggulan varietas ini terbukti sukses di Kampung Inovasi Subang dengan penerapan teknologi modern seperti sistem produksi padi sawah cerdas, deteksi pintar kesehatan padi dan layanan pintar pemupukan serta irigasi.

Menurut Menko Zulkifli Hasan, pemanfaatan lahan PSR untuk tumpang sari padi gogo dinilai mendesak sebagai kompensasi hilangnya sawah produktif di Pulau Jawa.

Selain itu, tumpang sari ini juga untuk memenuhi kebutuhan stok beras nasional, dan memperkuat



Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Indonesia memiliki potensi besar dalam tumpang sari ini. Ketersediaan lahan PSR, terutama pada tanaman sawit usia TBM hingga tiga tahun pertama PSR mencapai 400 ribu hektar per tahun pada 2025-2031 sesuai dengan target PSR. Tumpang sari padi gogo di lahan PSR dapat menyumbang produksi beras lebih dari 1,8 juta ton/tahun. Karena itu, partisipasi industri sawit merupakan langkah strategis mengamankan ketahanan pangan di masa depan. ■



MENJAGA KESEIMBANGAN SUPPLY AND DEMAND MINYAK SAWIT

Pengembangan lahan sawit khusus energi dapat dijalankan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono menyampaikan sejumlah masukan dan pemikiran dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang *Kajian Supply dan Demand Kelapa Sawit Serta Ekonomi dan Fiskal untuk Penerapan B50 di Indonesia*. FGD ini diselenggarakan oleh Aliansi Peneliti Pertanian Indonesia (Appertani) dan PT Superintending Company of Indonesia di Ra Suites Simatupang, Jakarta Selatan, 30 Januari 2025. Hasil kajian penerapan B50 mencakup dua hal. Pertama, pasokan dan permintaan. Kedua, ekonomi dan fiskal.

Hasil kajian menawarkan beberapa model *supply and demand* untuk merealisasikan target produksi 100 juta ton minyak sawit pada 2045. Termasuk dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal. Salah satu model yang diusulkan adalah memanfaatkan 2,7 juta lahan terlantar untuk kebun sawit, pencapaian PSR minimal 60% dari target, jaminan ketersediaan pupuk sesuai dosis dan rekomendasi serta transformasi kelembagaan sawit, terutama di hulu. Begitu juga dengan besaran subsidi

untuk biodiesel.

Menurut Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono produksi CPO 100 juta ton sangat cukup untuk mewujudkan swasembada energi. Swasembada energi akan dicapai secara bertahap di mana saat ini bauran minyak fosil dan minyak sawit sebesar 40% (B40). Kebijakan ini akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun 2026 dan dilanjutkan menjadi B60. Dalam penerapan B40 saat ini perlu dicarikan model yang paling menguntungkan untuk negara. Kebijakan B40 berjalan dengan tetap memenuhi kebutuhan ekspor CPO.

Ekspor CPO perlu mendapat perhatian karena berdampak pada banyak hal antara lain dana subsidi biodiesel yang berasal dari pungutan ekspor. Karena itu, fleksibilitas pencampuran biodiesel perlu memperhatikan keseimbangan antara produksi, konsumsi domestik, ekspor dan kebutuhan BBM impor, perkembangan harga CPO dan turunannya. Saat harga CPO rendah pencampuran biodiesel bisa ditingkatkan seperti yang dilakukan oleh Brasil dalam memanfaatkan etanol dari gula tebu.

Dalam pandangan GAPKI, untuk memastikan kebutuhan pangan, energi dan industri oleokimia dalam negeri serta pendapatan devisa tetap terjamin, peningkatan produktivitas tanaman adalah faktor kunci. Karena itu, target PSR harus terealisasi. Selama 2024, realisasi PSR baru 38.247 hektar dengan dana tersalurkan Rp 1,295 triliun. Padahal targetnya 70.000 hektar. Untuk tahun 2025, target PSR seluas 120.000 hektar. Diperlukan terobosan signifikan agar target PSR terealisasi.

Selain peningkatan produktivitas melalui program PSR, pengembangan kebun kelapa sawit khusus untuk energi perlu dilakukan. Pengembangan lahan sawit khusus energi dapat dijalankan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Dengan pola seperti ini, pasokan minyak sawit untuk kebutuhan domestik dan ekspor dapat dipenuhi secara bersama tanpa mengurangi alokasi salah satu pihak yang membutuhkan minyak sawit. ■

GAPKI TERIMA APRESIASI OUTSTANDING CONSERVING SUSTAINABLE NATURE

Sebelumnya GAPKI telah merehabilitasi sekitar 50 hektar hutan mangrove di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Komitmen dan partisipasi GAPKI dalam pelestarian lingkungan dan penanaman mangrove semakin diakui banyak kalangan. Asosiasi pengusaha kelapa sawit ini mendapatkan apresiasi *Outstanding Conserving Sustainable Nature* dalam kampanye *Semakin Hijau* yang digagas oleh Radio Elshinta di Ketapang Urban Aquaculture, Tangerang pada 4 Desember 2024. Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mewakili asosiasi menerima penghargaan ini.

GAPKI cukup aktif dalam pelestarian lingkungan dan konservasi lahan melalui penanaman mangrove. Dalam tiga tahun terakhir sejak 2021, sebanyak 140 ribu bibit mangrove ditanam di berbagai lokasi antara lain Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Tingkat kelangsungan hidup bibit mangrove yang ditanam oleh GAPKI mencapai 90%. Diharapkan mangrove yang ditanam dapat berkembang dengan baik dan mencegah garis pantai dari abrasi.

Sebelumnya GAPKI telah merehabilitasi sekitar 50 hektar hutan mangrove di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat abrasi tertinggi di provinsi tersebut.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono menegaskan konservasi mangrove sangat penting untuk menjaga ketahanan iklim dan ekosistem pantai. Penanaman mangrove merupakan komitmen GAPKI dalam merawat lingkungan di daerah yang memiliki perkebunan sawit atau tidak sehingga kerusakan karena faktor alam dapat dicegah,



paling tidak diminimalisir. Komitmen ini sejalan dengan program pemerintah menjaga keseimbangan lingkungan.

Kampanye *Semakin Hijau* di Tangerang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang, PLN, Radio Elshinta, WALHI dan Mangrove Jakarta Community. Sebagai bagian dari kampanye ini, peserta menanam mangrove dan melepas 64 ekor mimi (belangkas), spesies langka yang terancam punah, ke perairan. Desa Ketapang dipilih karena aktif merehabilitasi mangrove sejak 2014 dan akan membangun Pusat Riset Mangrove bekerja sama dengan IPB.

Sukses konservasi mangrove di Ketapang menarik perhatian Bank

Dunia dan UNDP yang menilai desa ini layak menjadi model pengelolaan pesisir berbasis keberlanjutan. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mengatakan Desa Ketapang cukup aktif dan inovatif dalam rehabilitasi lahan-lahan pesisir dengan mangrove.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Haryo Ristamaji, menyoroti peran penting edukasi lingkungan dalam mencegah abrasi pantai dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini karena mangrove berfungsi sebagai benteng alami dari terpaan gelombang ekstrem, mencegah erosi, dan menciptakan habitat bagi burung dan biota laut seperti belangkas. ■

NILAI STRATEGIS PSR DALAM KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Namun, dalam hitungan GAPKI, kebutuhan untuk peremajaan sawit sekitar Rp 112,4 juta.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diproyeksikan tidak hanya meningkatkan produksi sawit, namun juga kualitas panen dan kesejahteraan petani sawit. Hal ini dipaparkan oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto dalam diskusi terbuka dengan topik *Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues* (SIOP) yang diselenggarakan oleh GAPKI Cabang Sumatera Utara dan Harian *Bisnis Indonesia* di Medan pada 13 November 2024.

Program PSR juga menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan ketahanan pangan dan energi dengan memaksimalkan potensi tanaman sawit. Peningkatan produksi sawit petani diharapkan mampu memenuhi tambahan kebutuhan minyak sawit sebesar 6,6 juta ton untuk peningkatan bauran minyak sawit pada solar dari B40 menjadi B50. Apalagi luas lahan sawit rakyat 40% dari total lahan sawit nasional seluas 15,43 juta hektar.

Komoditas sawit memang strategis merealisasikan ketahanan pangan dan energi. Dalam catatan Kepala Divisi Perusahaan BPD PKS, Achmad Maulizal, jumlah petani sawit yang telah mendapatkan bantuan program PSR dari BPD PKS sebanyak 154.936 orang sejak tahun 2016 hingga 2024. Adapun luas lahan yang diremajakan mencapai 251.637 hektar yang tersebar di 21 provinsi di seluruh Indonesia.

GAPKI sebagai asosiasi pengusaha sawit mendorong percepatan PSR agar kebutuhan minyak sawit untuk dalam negeri dan ekspor sama-sama terpenuhi. GAPKI mengapresiasi kenaikan bantuan program PSR untuk petani kelapa sawit dari Rp 30 juta/hektar menjadi Rp 60 juta. Namun, dalam hitungan GAPKI, kebutuhan



untuk peremajaan sawit sekitar Rp 112,4 juta.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono yang menjadi narasumber SIOP mengusulkan pendanaan untuk PSR bersumber dari BPD PKS dan pinjaman. Skema ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar mempercepat realisasi PSR. Para pengusaha sawit sudah terlibat aktif dalam program peremajaan sawit rakyat ini melalui jalur kemitraan. Perusahaan anggota GAPKI bermitra dengan petani dalam meremajakan tanaman sawitnya.

GAPKI terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan BPD PKS untuk

memuluskan PSR yang masih banyak hambatan. Beberapa hambatan itu antara lain dokumen petani tidak tersedia, proses *upload* dokumen yang panjang, pembuatan poligon peta yang sulit karena biaya dan terbatasnya sumberdaya di lapangan, hingga keengganan petani kehilangan pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan.

Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting berharap hasil diskusi publik ini dapat menjadi masukan dan solusi bagi pemangku kepentingan sawit mencari solusi terbaik mempercepat realisasi PSR. ■

TANAM PERDANA PADI GOGO DI LAHAN PSR SUMATERA SELATAN

Pemanfaatan lahan kering untuk penanaman padi gogo ditargetkan 892.349 hektar di seluruh Indonesia.

GAPKI Cabang Sumatera Selatan menunjukkan partisipasi aktif dalam mendukung program ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintah. Bersama perwakilan dari Kementan, TNI Angkatan Darat, Polri, Pemerintah Provinsi Sumsel, dan Pemkab OKI, GAPKI Sumsel mengikuti Tanam Perdana Tumpang Sari Padi Gogo di Lahan Kelapa Sawit di lahan KUD Jaya Mulya di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 16 Januari 2025.

Partisipasi GAPKI Sumsel dalam kegiatan ini sudah dilakukan sejak jauh hari antara lain pada rapat persiapan bersama BSIP Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan pada 9 Januari 2025. Rapat ini untuk validasi data luas tanam faktual, potensi lahan, dan kesanggupan para mitra dalam mendukung pelaksanaan program. Validasi menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan keberlanjutan program tumpang sari.

Plt. Dirjen Perkebunan, Heru Tri Widarto mengatakan tanam perdana ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi padi, khususnya di lahan-lahan kering yang selama ini



belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian. Pemanfaatan lahan kering untuk penanaman padi gogo ditargetkan 892.349 hektar di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Selatan ditargetkan 54.855 hektar yang tersebar di 13 kabupaten.

Partisipasi perusahaan swasta dalam mewujudkan swasembada pangan melalui tumpang sari sangat berperan dalam kesuksesan program ini. Karena itu, penerapan kebijakan FPKM oleh perusahaan perkebunan sangat penting dalam merealisasikan target swasembada pangan. Kementan memberikan apresiasi kepada perusahaan swasta seperti perkebunan kelapa sawit yang telah menjalankan tumpang sari tanaman pangan.

Sementara itu, Pj. Bupati Ogan Komering Ilir, Asmar Wijaya menyampaikan rasa terima kasih

untuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pencapaian target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Heru berharap, sinergi antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, TNI, serta perusahaan mitra antara lain perusahaan kelapa sawit dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Di sisi lain, keberhasilan program ini diharapkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Program ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. ■



CHINA SEMAKIN CONCERN DENGAN SAWIT BERKELANJUTAN

Koordinasi Indonesia-Tiongkok ini untuk sinergi dalam mendorong rantai pasok minyak sawit yang berkelanjutan.

Para pengusaha China memiliki perhatian besar terhadap jaminan kelangsungan pasokan minyak sawit dari Indonesia. Peran minyak sawit untuk industri makanan di China sangat penting sehingga pasokan harus berkelanjutan dan produknya memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. China berkepentingan dengan minyak sawit Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dalam negerinya.

Untuk menjamin pasokan minyak sawit dari Indonesia, *China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products (CFNA)* dan *The World Resources Institute Beijing Representative Office (WRI)* bekerjasama dengan beberapa asosiasi pengusaha sawit Indonesia mengadakan Pertemuan Koordinasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia-Tiongkok di Jakarta pada 14 November 2024.

Pertemuan ini dihadiri juga oleh Presiden Departemen Sereal dan Minyak CFNA, Cao Derong; Sekjen CPOPC, Rizal Affandi Lukman; Minister Counsellor Kedutaan Besar Tiongkok

untuk Indonesia, Geng Jianzhong; Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, Ketua Hubungan Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan, dan Wasekjen GAPKI Lolita Bangun

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid yang mewakili Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional mengatakan pertemuan koordinasi ini untuk sinergi antara Indonesia dan Tiongkok dalam mendorong rantai pasok minyak sawit yang berkelanjutan. Keberlangsungan dan kesiapan rantai pasok sangat penting menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak nabati China.

Direktur Miftah Farid menegaskan Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk sawit berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena itu, industri sawit diatur secara ketat sehingga produk yang dipasarkan di luar negeri adalah produk yang sudah memenuhi *standard* dan prinsip-prinsip pasar global. Termasuk di dalamnya masalah rantai pasok yang menjadi bagian penting dalam pemasaran minyak sawit Indonesia.



Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan China merupakan pasar penting minyak sawit Indonesia. Ekspor CPO Indonesia ke China selama 2023 mencapai 7,7 juta ton. China masih menjadi negara importir terbesar minyak sawit Indonesia bersama India. Konsumsi minyak nabati di negeri ini cenderung naik. Peningkatan harga CPO harus disikapi dengan bijak karena potensi ancaman minyak nabati lain sebagai kompetitor cukup besar.

Minyak bunga matahari merupakan pesaing paling serius bagi minyak sawit Indonesia karena selisih harganya makin hari makin menipis. Bahkan, pada pertengahan 2024 silam, harga minyak bunga matahari di China lebih murah dibandingkan minyak sawit. Antisipasi harus dilakukan karena China memborong minyak bunga matahari saat harganya jatuh. ■



BADAN SAWIT SOLUSI TATA KELOLA INDUSTRI SAWIT

Setiap tahun potensi pendapatan Rp 279,1 triliun hilang akibat maladministrasi.

Laporan setebal hampir dua sentimeter lebih itu diterima oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dari anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra. Di sampul laporan tertera judul *Hasil Kajian Sistemik tentang Tata Kelola Industri Kelapa Sawit*. Penyerahan dokumen di Gedung Ombudsman di Jakarta, 18 November 2024 juga diberikan kepada 11 instansi lainnya. Hasil kajian ini digali dari 51 pihak seperti pemerintah pusat, provinsi, daerah, perusahaan,

dan pihak lainnya sejak 27 Mei 2024 hingga 3 Oktober 2024.

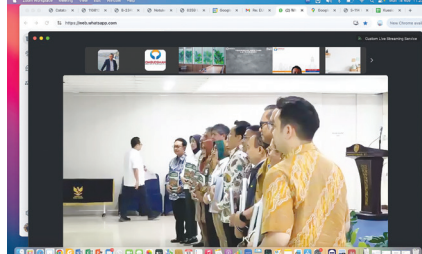
Kajian yang dilakukan oleh Ombudsman RI berangkat dari realitas di lapangan yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha di sektor sawit. Ketidakpastian layanan, masalah keamanan, tumpang tindih kebijakan, dan masalah lain

yang memicu ketidakefisienan dalam industri sawit menjadi masalah klasik di industri ini. Masalah inilah yang digali dan dibedah oleh Ombudsman RI sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Hasil kajian Ombudsman RI sebenarnya membuat kita tercengang. Tata kelola yang tidak efisien, rumit sampai terjadi maladministrasi yang membuat potensi industri ini tidak dapat dimaksimalkan oleh pemangku kepentingan sawit.

BADAN SAWIT





Setiap tahun potensi pendapatan senilai Rp 279,1 triliun hilang akibat maladministrasi di industri sawit. Maladministrasi ini berasal dari aspek kelembagaan, perizinan, tata kelola, dan lain-lain.

Yeka Hendra mengatakan maladminsitrasi dalam hasil kajian ini intinya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian proses administrasi, atau penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Maladministasi terjadi karena ketidakjelasan prosedur, regulasi, dan praktik perizinan yang tidak transparan sehingga terjadi ruang penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan.

Menurut Yeka Hendra, pihaknya menemukan potensi maladministrasi dalam ragam bentuk antar lain ketidakpastian layanan, pengabaian kewajiban hukum, tidak memberikan layanan, penyimpangan hukum dan ketidakjelasan prosedur dalam tata kelola industri kelapa sawit. Secara khusus dia menyoroti masalah layanan yang diselenggarakan oleh negara dalam tata kelola industri sawit.

“Hasil kajian ini adalah potret menyeluruh persoalan dalam tata kelola sektor ini khususnya masalah layanan yang diselenggarakan negara,” katanya. Pada aspek kelembagaan, Yeka menilai tata kelola sawit yang ditangani banyak kementerian/lembaga yang tidak terpadu ini justru menimbulkan masalah pada implementasi di lapangan. Tabrakan kebijakan adalah konsekwensi dari banyaknya pihak yang campur tangan dalam urusan sawit.

Begitu juga dengan aspek lahan di mana terjadi tumpang tindih lahan perkebunan sawit dan kawasan hutan yang mencapai 3,22 juta hektar. Hal ini mengganggu keberlangsungan usaha

sawit akibat ketidakpastian hukum. Penyelesaian dengan mekanisme Pasal 110A UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja baru selesai 7 persen hingga Oktober 2024. Masih ada 3.063 dari total 3.235 subyek hukum yang belum terselesaikan. Masalah tata niaga juga tidak luput dari kajian Ombudsman yang menyimpulkan perlu terobosan besar.

Dengan temuan fakta lapangan ini, Ombudsman RI merekomendasikan kepada pemerintah perlu segera membentuk badan nasional yang mengurus tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. Badan ini berada di bawah kendali langsung Presiden yang diberi kewenangan cukup untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terkait urusan yang berkaitan dengan industri sawit.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sepakat dengan rekomendasi Ombudsman RI. Apalagi pembentukan badan sawit menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto pada masa kampanye pemilihan presiden. GAPKI berkomitmen mengawal Presiden Prabowo dalam mewujudkan janji kampanye membentuk badan sawit. Untuk itu, GAPKI berharap dukungan pemerintah dan DPR membentuk satu badan khusus yang menangani industri sawit.

Badan sawit memiliki peranan penting untuk menjaga dan memperkuat keberlangsungan industri sawit sebagai komoditas andalan Indonesia. Apalagi Presiden Prabowo menyatakan kelapa sawit bukan sekadar komoditas strategis, namun merupakan aset strategis negara untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan nasional. Penegasan Presiden disampaikan dalam Musrenbang

Nasional di Bappenas pada 30 Desember 2024.

Sebagai aset strategis negara, Presiden meminta kepala daerah seperti gubernur, bupati, pejabat tentara, polisi, dan pejabat lainnya untuk bersama-sama menjaga komoditas sawit. Salah satu kondisi penting yang harus diwaspadai adalah menjaga kebun sawit dari tindak kriminalitas dan gangguan keamanan.

Dalam pandangan GAPKI, pembentukan badan sawit sejalan dengan program pemerintah yakni hilirisasi. Dalam komoditas sawit, untuk memperkuat hilirisasi tidak sekadar sektor hilir yang diperkuat, tapi juga sektor hulu. Penguatan sektor hulu menjadi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 di mana produksi sawit ditargetkan 100 juta ton. Apalagi badan sawit tidak hanya mengurus korporasi sawit, namun juga petani kelapa sawit yang sangat strategis dalam peningkatan produksi sawit nasional.

Kehadiran badan sawit dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berujung pada potensi terjadinya maladministrasi seperti temuan Ombudsman RI. Dunia usaha berharap adanya kepastian hukum bagi perkebunan sawit untuk mengukuhkan posisi sawit sebagai aset strategis negara.

Pakar hukum Dr. Sadino mengatakan kejelasan pemberian legalitas kebun sawit rakyat, perpanjangan dan pembaharuan HGU merupakan kunci penting Indonesia agar tetap berjaya sawitnya karena investasi sawit adalah menanam hari ini untuk dikelola sampai 25 tahun ke depan. Karena itu, badan sawit diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah disampaikan oleh Ombudsman RI. ■

DARI MANA ANGKA RP 279,1 TRILUN BERASAL?

Maladministrasi dalam tata kelola industri kelapa sawit berpotensi menghilangkan Rp 279,1 triliun per tahun dari pendapatan negara. Apabila tata kelola ini diperbaiki, maka Rp 279,1 triliun itu berubah menjadi tambahan pendapatan negara. Dari mana angka Rp 279,1 triliun berasal? Begini hitung-hitungan Ombudsman RI.

1

Tumpang tindih lahan kebun sawit dan kawasan hutan seluas 3,2 juta hektar dengan 3.235 subyek hukum. Potensi kerugian dari masalah ini Rp 76,8 triliun.

2

Selisih kualitas bibit pada setiap selisih produksi sebesar 3,8 ton per hektar antara yang bersertifikat ISPO dan belum. Potensi kerugian dari masalah ini Rp 74,1 triliun.

3

Kematangan yang tidak standard pada kebun rakyat seluas 6 juta hektar dengan produksi 12,8 ton per hektare pada harga Rp 3.000/kg TBS. Potensi kerugian dari masalah ini Rp 11,5 triliun.

SUARA HARAPAN DARI DUNIA USAHA

Tanpa kewenangan yang besar, masalah tata kelola sawit rasanya sulit untuk diselesaikan.

Seberapa besar harapan pengusaha di sektor kelapa sawit agar badan sawit dibentuk untuk mengelola sektor sawit dari hulu hingga hilir? Jawabannya tentu besar sekali. Ombudsman RI bahkan merekomendasikan badan sawit sebagai solusi masalah yang terjadi. Begitu juga dunia usaha yang memiliki harapan sama. Apalagi Presiden Prabowo menjadikan kelapa sawit sebagai pondasi mewujudkan ketahanan pangan dan energi.

Harapan dunia usaha terhadap badan sawit ini disampaikan oleh Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga dalam seminar *Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan* yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Kementerian Pertanian, 19 Desember 2024. Dalam seminar ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan, R. Aziz Hidayat yang dipercaya menjadi salah satu pembicara.

Menurut Sahat Sinaga, untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan nasional sesuai harapan Presiden Prabowo, maka masalah tata kelola industri sawit harus dibereskan lebih dahulu. Pembenahan tata kelola dilakukan oleh badan khusus yang menangani kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Tanpa kewenangan yang besar, masalah tata kelola sawit rasanya sulit untuk diselesaikan.

Sementara itu, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Azis Hidayat menegaskan bahwa tim ahli dari tiga calon presiden pada masa



Temuan Ombudsman luar biasa dan harus menjadi perhatian eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mengingat sawit istimewa bagi Indonesia, diperlukan satu Badan untuk mengelola urusan sawit A-Z sehingga masyarakat mendapat pelayanan satu pintu.

PROFESOR BUDI MULYANTO
Ketua Pusat Studi Sawit IPB

pemilihan presiden sudah sepakat bahwa pembentukan badan khusus sawit yang mengurus urusan sawit hulu-hilir sangat penting untuk dibentuk. Dengan satu badan khusus, penanganan urusan sawit akan lebih fokus dan terarah. Saat ini, urusan sawit ditangani oleh 37 kementerian dan lembaga yang punya kebijakan berbeda.

Pandangan dan kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga yang berbeda membuat tidak fokus. Dia mencontohkan langkah gugatan WTO yang tidak tuntas karena setiap pihak punya pandangan yang berbeda. Pada



Kalau pemerintah mengakui sawit ini berkontribusi besar, mau dikemanakan regulasinya harus jelas. Pemerintah perlu membentuk badan yang khusus menangani sawit agar lebih berdaya guna.

FIRMAN SUBAGYO
Anggota Komisi IV DPR

akhirnya, masalah tidak tuntas karena tidak satunya langkah yang akan ditempuh. Jika badan sawit berdiri, urusan sawit bisa diserahkan kepada badan yang diberi kewenangan, termasuk masalah diplomasi sawit ke luar negeri.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang sudah berdiri diharapkan dapat dikembangkan perannya menjadi badan sawit. Sumber daya manusia sudah tersedia dan infrastruktur sudah terbangun. Asosiasi pengusaha kelapa sawit siap mendukung jika BPDPKS dikembangkan menjadi badan sawit. ■



PAKISTAN, PASAR POTENSIAL YANG HARUS DIRAWAT

Program B40 diharapkan tidak mengurangi volume minyak sawit untuk pasar ekspor.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan perkembangan industri sawit di Indonesia dalam forum tahunan *the 7th Pakistan Edible Oils Conference* di Karachi, 11 Januari 2025. Konferensi ini sangat penting bagi GAPKI karena Pakistan merupakan salah satu dari lima negara pembeli utama minyak sawit dari Indonesia. Penjelasan GAPKI sangat ditunggu, terutama aspek produksi karena sangat berdampak pada minyak nabati global.

Konferensi tahunan di Pakistan ini dihadiri peserta dari berbagai negara, terutama negara-negara eksportir minyak nabati seperti Malaysia. Berbagai produsen minyak nabati hadir karena Pakistan termasuk pasar besar dalam perdagangan minyak nabati global. Pengamat dan analis minyak nabati dunia seperti Dorab Mistry hadir sebagai pembicara. Karena itu, *Pakistan Edible Oils Conference* dinilai cukup strategis.

Produksi minyak sawit di Indonesia cenderung menurun sejak 2005 karena berbagai faktor. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi kelapa sawit. Pada periode 2005-2010 terjadi penurunan produksi sebesar 10%. Penurunan berikutnya terjadi pada periode 2010-2015 di mana produksi sawit turun 7,4%. Adapun periode 2015-2020 turun 3,2% dan selanjutnya kondisinya stagnan.

Upaya peningkatan produksi terus dilakukan salah satunya melalui peremajaan sawit rakyat. Peningkatan produksi, kata Eddy Martono, paling tinggi hanya akan mencapai tidak lebih dari 5%. Jika mandatori B35

diperpanjang, maka kebutuhan domestik Indonesia mencapai 25 juta ton. Maka ekspor CPO tahun 2024 sekitar 29 juta ton,” katanya.

Konsumsi dalam negeri Indonesia memang terus meningkat dalam lima tahun belakangan seiring dengan naiknya mandatori biofuel. Begitu juga dengan konsumsi untuk oleokimia yang terus tumbuh sebagai dampak lanjutan dari pandemic Covid-19. Sedangkan konsumsi makanan/minyak goreng relatif stabil dalam tiga tahun terakhir kecuali pada 2022 ketika konsumsi minyak goreng meningkat karena kelangkaan di pasar pada awal tahun.

CEO PEOC (*Pakistan Edible Oils Conference*), Abdul Rasheed Jan Mohammad mengatakan negaranya sangat bergantung pada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Pakistan memenuhi 83% kebutuhan minyak nabatnya dengan impor, di mana sebanyak 76% diantaranya berasal dari minyak sawit. Indonesia memasok sekitar 90% kebutuhan minyak sawit Pakistan. Sisanya dipenuhi oleh Malaysia.

Abdul Rasheed Jan Mohammad berharap Indonesia tidak tergesa-gesa mengalihkan fokus dari program B35 ke B40, mengingat pentingnya pasokan minyak sawit Indonesia untuk menjaga keamanan pangan di Pakistan. Selain itu, peningkatan campuran minyak sawit pada bahan bakar fosil di Indonesia akan berpengaruh pada pasar minyak nabati dunia. Program B40 diharapkan tidak mengurangi volume minyak sawit untuk pasar ekspor. ■



GAPKI BANGUN DIALOG KETENAGAKERJAAN DENGAN EROPA

GAPKI sudah mengambil langkah proaktif dalam merespons isu perburuhan sejak 2016.

Isu ketenagakerjaan terus menjadi concern industri sawit nasional, terutama oleh GAPKI. Berbagai terobosan dilakukan untuk memenuhi hak-hak para pekerja guna meningkatkan kesejahteraan mereka. GAPKI juga memiliki perhatian besar pada perlindungan perempuan dan anak-anak dalam konteks perkebunan sawit. Kondisi aktual ini yang dipresentasikan oleh delegasi Indonesia ke Belanda dan Belgia yang dipimpin oleh Kabid Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih.

Muhibah sepekan ini dilakukan pada 18-22 November 2024 dengan tema *The Palm Oil Multistakeholder Knowledge Exchange Week*. Dalam acara ini, GAPKI juga



diwakili oleh Komp. Pemberdayaan Masyarakat & CSR Nunik Maharani, Staf Sekretariat Eko Sanjaya Tamba, Direktur Human Capital PT Astra Agro Lestari, Tbk Eko Prasetyo, Stakeholder Communication Europe GAR Wulan Suling, Ketua Umum Hukatan Nursanna Marpaung, dan perwakilan FNV International, CNV International, dan lain-lain.

Dialog dengan berbagai pihak di Belanda dan Belgia ini

sangat penting karena Perlemen Uni Eropa mengadopsi CSDDD (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*) sejak April 2024. CSDDD adalah peraturan yang mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab tentang keberlanjutan dan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara pengekspor minyak sawit ke pasar Eropa akan terdampak dengan peraturan ini. Muhibah ke Uni Eropa ini bertujuan menjelaskan kondisi perburuhan di industri sawit di Indonesia.

Sumarjono Saragih mengatakan GAPKI sudah mengambil langkah proaktif dalam merespons isu perburuhan sejak 2016 sebagai transparansi wajah perburuhan sawit. Kolaborasi dengan serikat buruh nasional/ internasional ini dalam rangka membangun dialog yang konstruktif. Kondisi ini yang disampaikan dalam 10 sesi dialog intensif dengan Luar Negeri dan Pertanian Belanda, Parlemen Belanda, Komisi Uni Eropa Bidang Perdagangan dan Kerjasama, asosiasi pengusaha Eropa, NGO, dan serikat buruh di Eropa.

Dialog ini memberi gambaran yang lebih utuh kondisi perburuhan di industri sawit kepada Uni Eropa sebagai pertimbangan dalam penerapan CSDDD dan HRDD (*Human Rights Due Diligence*). Selain itu, muhibah ini juga ajang pendekatan



kepada pemangku kepentingan utama di Eropa yang terkait sektor sawit. Karena itu, dalam waktu dekat GAPKI menajaki inisiatif kerjasama dengan Uni Eropa.

Menurut Sumarjono Saragih, ada hal menarik tentang CSDDD dan EUDR yang disampaikan oleh Mr. Alejandro Gonzalez, Sustainable & Development Group Advisor. Pada pertemuan di Bambino, Brussel, 22 November 2024, Alejandro menjelaskan bahwa CSDDD lebih luas dalam rantai nilai global karena melibatkan aspek hak asasi manusia hingga upah layak bagi buruh. Sedangkan EUDR lebih sempit karena berfokus pada komoditasnya saja.

Dengan berfokus pada hak asasi manusia, salah satu *point* penting dalam legislasi CSDDD adalah penerapan standard upah layak. Menurut Alejandro, standard upah layak adalah bagian integral dari CSDDD yang berpotensi menimbulkan interpretasi beragam di lapangan. Untuk mengantisipasi kondisi ini, dialog interaktif dan konstruktif dengan mitra di Uni Eropa menjadi faktor penting penerapan standar perburuhan yang lebih baik di sektor sawit.

Langkah delegasi *bipartite* dan pengusaha Indonesia ini mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan di Uni Eropa. Anggota Komisi Uni Eropa Bidang Perdagangan, Francesco Flores mengatakan diplomasi yang dilakukan delegasi bipartit dan pengusaha ini merupakan yang pertama dalam diplomasi sawit. Hal ini dinilai penting karena penghormatan hak-hak

buruh menjadi bagian penting dalam dokumen perjanjian dagang EU CEPA.

Apresiasi juga diberikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Mayesfas dan Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa-Belgia, Andri Hadi. Delegasi bipartit dan pengusaha ini mengadakan kunjungan ke kantor dua kedutaan besar Indonesia. Apalagi muhibah ini diatur oleh dua serikat buruh Belanda, CNV dan FNV yang berpengaruh di Eropa dan punya jaringan global. CNV dan FNV adalah mitra GAPKI dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam muhibah ini, Sumarjono Saragih menyerahkan buku *Panduan Praktis Perlindungan Perempuan dan Anak* yang diterbitkan oleh GAPKI sebagai bentuk komitmen dan panduan bagi perusahaan sawit dalam mengelola tenaga kerja. Buku diserahkan kepada tuan rumah di setiap akhir pertemuan. Dubes Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas memberikan apresiasi atas komitmen GAPKI dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan di industri sawit.

Dalam pertemuan di KBRI di Den Haag pada 21 November 2024, dengan Dubes Mayerfas mengatakan selama ini pihaknya cukup aktif melakukan promosi dan edukasi tentang sawit kepada masyarakat Belanda. Regulasi yang berpengaruh pada industri sawit Indonesia juga menjadi perhatiannya. Dia berharap regulasi yang menghambat perdagangan minyak sawit dapat disepakati titik temu sehingga hubungan dagang semakin positif. ■

RENCANA TINDAK LANJUT

Dari 10 sesi dialog bersama pemangku kepentingan di Uni Eropa, ada beberapa program rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- Memfasilitasi dialog antara GAPKI dan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa dan mendorong advokasi penyertaan hak-hak buruh dalam penerapan CSDDD.
- Penyesuaian kebijakan untuk menyelaraskan UU Cipta Kerja dengan persyaratan HRDD internasional untuk melindungi pekerja informal dan pekerja harian.
- Mendukung kelompok petani untuk memastikan keterlibatan mereka dalam rantai nilai yang berkelanjutan.
- Memperkuat kerangka kerja kolaboratif antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk menyelaraskan tujuan CSDDD dan EUDR.
- Memperkuat kemitraan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan negosiasi bipartit dan keselamatan di tempat kerja.
- Menyelaraskan kebijakan Indonesia dengan standar keberlanjutan internasional untuk meningkatkan daya saing di pasar global.



KOMITMEN GAPKI STABILKAN RANTAI PASOK CPO UNTUK PAKISTAN

Pakistan adalah salah satu importir utama minyak sawit Indonesia.



GAPKI berkomitmen menstabilkan rantai pasok minyak sawit untuk Pakistan seiring dengan tantangan ekspor CPO Indonesia ke Pakistan yang kian besar. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam *The Indonesia-Pakistan Workshop on Palm Oil 2025: Strengthening Sustainable Palm Oil for the World* di Karachi pada 9 Januari 2025. Seminar dan promosi produk kelapa sawit Indonesia diadakan oleh GAPKI bekerjasama dengan Konjen RI di Karachi, CPOPC, dan POSAP.

Penegasan komitmen ini disampaikan karena ekspor CPO Indonesia ke Pakistan cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, Pakistan adalah salah satu importir utama minyak sawit Indonesia. Tantangan ekspor CPO ke Pakistan menghadapi tantangan besar yang dipicu oleh fluktuasi harga akibat pajak dan tarif ekspor di Indonesia. Sementara itu, tantangan dari Pakistan

dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

GAPKI mendorong pemerintah Indonesia dan Pakistan menyelesaikan negosiasi *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA)* untuk memfasilitasi perdagangan kedua negara. Selain itu, GAPKI juga mendorong peluang kerjasama lebih lanjut semua pemangku kepentingan kedua negara seperti joint venture pengolahan minyak sawit. Kerjasama ini juga mencakup pertukaran teknologi dan inisiatif sawit berkelanjutan.

Dalam seminar yang dihadiri 130 peserta dari berbagai latar belakang ini, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan menyampaikan industri sawit di Indonesia mengalami tiga dilema. Tiga dilema itu adalah ekspor vs biofuel, makanan vs biofuel, dan ekspor vs pasar dalam negeri. Dilema ini tidak lepas dari penurunan produksi sawit dalam periode 2021-2024 dan ekspansi lahan sawit yang stagnan.

Dalam seminar dan kegiatan promosi ini, CPOPC mengundang Konsul Jenderal Thailand di Karachi, yakni Surashete Boontinand. Sekjen CPOPC, Rizal A. Lukman mengajak pemerintah Thailand bergabung menjadi anggota CPOPC. Produksi minyak sawit Thailand rata-rata di kisaran 3.450 ton dengan pangsa pasar globalnya 4%. Potensi Thailand mengembangkan komoditas sawit cukup besar karena secara iklim sama Indonesia dan Malaysia.

Pejabat Konsul Jenderal Indonesia di Karachi, Teguh Wiweko memberikan apresiasi kepada GAPKI yang aktif dalam berbagai forum internasional untuk kepentingan sawit nasional. Langkah-langkah yang dijalankan GAPKI bersama pihak lain seperti CPOPC dan pemerintah Indonesia cukup berdampak terhadap perkembangan industri sawit nasional. Bahkan, pasar minyak nabati dunia pada dasarnya sangat bergantung pada minyak sawit dari Indonesia. ■

MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DENGAN DIVERSIFIKASI PRODUK

Diversifikasi produk berbasis sawit adalah langkah strategis meningkatkan daya saing.



Inovasi menjadi kata kunci dalam pengembangan produk berbasis kelapa sawit. Perluasan produk turunan dari sawit atau diversifikasi dapat memberikan nilai tambah sawit. Karena itu, pemangku kepentingan industri sawit mendorong diversifikasi produk, termasuk untuk produk *nonmainstream*. Dukungan diversifikasi produk terungkap di *Workshop Diversifikasi Produk Kelapa Sawit Khusus Pakan Ternak, Biomassa, Coklat, Krimer, dan Dupa Sawit*.

Dalam workshop yang diadakan oleh BDPKPS dan Majalah Sawit Indonesia di Malang pada 25 November 2024, GAPKI dipercaya menjadi salah satu narasumber. GAPKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum III Satrija B Wibawa dan Direktur Eksekutif Mukti Sardjono. *Workshop* ini dihadiri para pelaku UKM yang menghasilkan produk diversifikasi antara lain PT Interstiti Material Maju dan PT Sawit Arum Madani.

Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi BDPKPS, Helmi Muhansah menegaskan sawit memiliki prospek menjanjikan dengan potensi pengembangan produk turunan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, pakan, hingga manufaktur. Selain CPO dan PKO, sawit dapat diolah menjadi produk seperti helm berbahan bio-komposit, parafin, pengawet buah, hingga baterai berbasis limbah sawit.

Program UKM Naik Kelas bertujuan memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi untuk memproduksi produk berbasis sawit, seperti batik, lilin, dan sabun. Dengan produksi ini, pelaku UKM dan koperasi diharapkan menjadi mitra strategis memperluas diversifikasi sawit di Indonesia. Selama ini UKM cukup banyak mendapatkan bantuan berupa pelatihan hingga kemitraan dari pelaku bisnis anggota GAPKI.

Workshop selama dua hari di Malang ini juga menjadi ajang promosi dan edukasi manfaat produk turunan sawit. Apalagi produk berbasis kelapa sawit memenuhi kebutuhan sehari-hari umat manusia. Beberapa produk berbasis sawit yang lazim dikonsumsi antara lain krimer, cokelat, dan lain-lain. Diversifikasi produk berbasis sawit adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri kelapa sawit nasional.

Selama ini, GAPKI telah memberikan perhatian pada pengembangan UKM melalui banyak aktivitas anggota GAPKI. Salah satunya melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar kebun sawit. UKM berbasis sawit diharapkan mendorong hilirisasi dalam arti memperbanyak produk yang diproduksi dengan cara memanfaatkan tanaman kelapa sawit. ■



GAPKI SUMUT BAHAS ISU TERKINI BERSAMA PJ GUBERNUR SUMUT

Pemprov Sumut juga berharap industri sawit dapat memaksimalkan program CSR

Sebagai provinsi dengan sejarah panjang perkebunan kelapa sawit, kondisi terkini sawit di Sumatera Utara menjadi perhatian serius GAPKI Cabang Sumatera Utara. Berbagai isu antara lain program PSR, Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, tenaga kerja, produksi sawit, dan keamanan investasi di sektor sawit menjadi pembahasan utama dalam audiensi antara GAPKI Sumut dan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni di Rumah Dinas Gubernur di Medan, 5 November 2024.

Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting mengatakan sejumlah isu yang dibahas antara lain regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Tapi, pembahasan tentang PSR cukup serius karena menyangkut dana hibah dari BPDPKS kepada petani untuk PSR. Petani sawit sangat antusias dengan program ini meskipun masih mengalami kendala, terutama penyelesaian masalah administrasi.

Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut, ada 490.000 hektar lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektar luas sawit di Sumatera Utara. Sejak tahun 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi bantuan PSR seluas



25.581 hektar. Pada tahun 2024, ditargetkan 9.500 hektar lahan sawit rakyat yang diremajakan. Namun, sampai November 2024, realisasi peremajaan masih sekitar 3.000 hektar.

Hambatan administrasi yang dialami petani disampaikan oleh GAPKI Sumut. Harapannya pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi untuk percepatan PSR. Harmonisasi ini mencakup masalah legalitas lahan, kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Sinergi dunia usaha dan pemerintah menjadi faktor kunci untuk keberhasilan program PSR ini.

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni memahami isu yang disampaikan

GAPKI Sumut. Pihaknya juga menyampaikan masalah ini kepada pemerintah pusat. Terkait DBH dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dan pemerintah membahas sektor sawit dengan menerapkan satu data. Kesesuaian data sangat penting sebagai bahan utama dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan.

Dalam audiensi ini, Pemprov Sumut juga berharap industri sawit dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR. Bentuk program ini tidak harus berupa uang tunai, namun diberikan dalam bentuk rumah ibadah, sarana Pendidikan, beasiswa untuk keluarga kurang mampu, dan program

pemberdayaan lainnya. Pemprov Sumut juga memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana yang menasar perkebunan sawit. ■



RYAN HARI SUPRIANTO, NAKHODA BARU GAPKI CABANG JAMBI



Kemajuan sebuah organisasi tidak lepas dari kemampuan untuk membangun komunikasi dan koordinasi.

Musyawarah Cabang ke-VII GAPKI Cabang Jambi yang diselenggarakan di Hotel BW Luxury, Jambi pada 16 Januari 2025 berlangsung lancar. Muscab yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota GAPKI Jambi ini juga dihadiri Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Dalam Muscab ini, Ryan Hari Suprianto terpilih sebagai Ketua GAPKI Jambi periode 2025-2030 menggantikan Tidar M. Bagaskara yang telah memimpin GAPKI Jambi selama dua periode.

Ryan Hari Suprianto mengatakan jabatan Ketua GAPKI Cabang Jambi adalah amanah dari anggota yang harus ditunaikan sebaik mungkin. Dia juga berjanji mendengarkan masukan dari para tokoh industri sawit untuk kemajuan komoditas sawit di provinsi ini. Yang tidak kalah penting adalah koordinasi dan kolaborasi dengan GAPKI Pusat dalam menjalankan program-program organisasi.

Salah satu yang ingin dilakukan pengurus GAPKI Jambi saat ini adalah mengajak perusahaan kelapa

Dari 119 perusahaan, yang bergabung dengan GAPKI Jambi 36 perusahaan.

sawit yang beroperasi di Jambi bergabung dengan GAPKI. Jumlah perusahaan sawit di Jambi sekitar 119 perusahaan. Dari 119 perusahaan, yang bergabung dengan GAPKI Jambi 36 perusahaan. Untuk itu, keberadaan GAPKI Jambi harus benar-benar dirasakan anggota dan perusahaan sawit di provinsi ini sehingga menjadi daya tarik untuk bergabung.

Tidar M. Bagaskara menyambut baik terpilihnya Ryan Hari Suprianto sebagai penerusnya dalam memimpin GAPKI Jambi. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada SC dan OC yang sudah menyelenggarakan Muscab ke-VII dengan baik sesuai dengan AD/ART GAPKI. Dia berharap perjalanan organisasi para pelaku usaha kelapa

sawit ini semakin baik dan manfaatnya semakin dirasakan oleh anggota maupun perusahaan bukan anggota.

Ketum GAPKI Eddy Martono mengucapkan selamat atas terpilihnya Ryan Hari Suprianto sebagai Ketua GAPKI Cabang Jambi dan berharap peran GAPKI Jambi semakin signifikan. Sebab, tantangan industri sawit di masa depan semakin kompleks yang membutuhkan kebersamaan dan soliditas untuk menghadapinya. Semua itu tentunya dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik.

Ketua GAPKI mengatakan kemajuan sebuah organisasi tidak lepas dari kemampuan untuk membangun komunikasi dan koordinasi. Karena itu, GAPKI Jambi diharapkan terus aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan GAPKI Pusat untuk mensinergikan program kerja dan prioritas program yang akan dijalankan. Sebagaimana daerah lain, Jambi punya peran strategis dalam pengembangan industri kelapa sawit nasional. ■

GAPKI DAN LPPNU MATANGKAN SAWIT GOES TO PESANTREN

Program Sawit Goes to Pesantren melengkapi produk edukasi dan kampanye positif tentang sawit.

Setelah menyepakati kerjasama program *Sawit Goes to Pesantren* menjelang akhir tahun lalu, GAPKI dan Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LPPNU mulai menyiapkan tanam perdana.

Persiapan tanam perdana oleh pesantren yang berada di bawah payung NU dibahas dalam pertemuan antara GAPKI dan LPPNU di Kantor GAPKI pada 3 Januari 2025.

Dalam rapat ini GAPKI diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono, Sekjen M. Hadi Sugeng, Wakil Ketua Umum II Susanto, dan pengurus harian lainnya. Sedangkan LPPNU diwakili oleh pengurus hariannya. Pertemuan ini untuk mematangkan implementasi program *Sawit Goes to Pesantren* yang berkaitan dengan aspek teknis tentang sawit. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono berharap langkah perdana ini berjalan lancar.

Program *Sawit Goes to Pesantren* melengkapi produk edukasi dan kampanye positif yang sebelumnya sudah menasar masyarakat dengan program *Sawit Goes to School* dan *Sawit Goes to Campus*. Program ini diluncurkan oleh LPPNU di Jakarta pada 26 Oktober 2024 dan mendapatkan dukungan dari BDPKS.

Peresmian program ini dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Kepala Divisi UKMK BDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, dan Plt Dirjenbun Kementan Heru Tri Widarto. Program ini diharapkan berdampak positif bagi industri sawit, kalangan pesantren, dan petani sawit yang ternyata banyak warga NU.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengapresiasi program *Sawit Goes*

to Pesantren sebagai langkah positif mendukung Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam pertemuan antara LPP PBNU dan GAPKI di kantor GAPKI pada 16 Oktober 2024, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan peluang dan tantangan industri sawit nasional.

Sekretaris LPPNU sekaligus Ketua Pelaksana Program *Sawit Goes to Pesantren*, Tri Chandra Aprianto, mengatakan sejumlah masalah masih membelit industri sawit dari hulu sampai hilir. Seperti legalitas lahan, tumpang tindih lahan, dan penguatan kelembagaan petani. Bagi perkebunan rakyat, persoalan semacam ini berdampak besar terhadap capaian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Kementerian Pertanian mengapresiasi dan mendukung penuh *Sawit Goes to Pesantren* sebagai terobosan luar biasa. Di tengah serbuan kampanye negatif sawit, langkah-langkah positif tetap harus dijalankan bersama komunitas di tengah masyarakat. ■

